

Accepted: Januari 2022	Revised: Februari 2022	Published: Maret 2022
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Peran Bank Sentral Dalam Kebijakan Moneter Islam

Miftakhul Huda

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

email: okemiftakhul@gmail.com

Abstract

The effectiveness of the implementation of economic activities in each country always requires the role of payment instruments that stabilize the exchange rate so that there is no inefficiency due to fluctuating prices of products and financial institutions that have the authority to regulate and determine monetary policy called the Central Bank. The objectives of the central bank's policy as the holder of monetary authority include issuing money, controlling the circulation of money to adjust the fact of economy in the real sector so that there can be a balance. Monetary policy in each government is different from looking at the conditions and realities of each economic development. In response to this, one of the monetary policies taken in the reign of the Prophet's era was to use the gold and silver standards because of the level of exchange rate stability. However, this does not necessarily apply to monetary policy in Muslim-majority countries in the modern era, including in Indonesia, due to the scarcity of raw materials for gold and silver money. In its place, fiducier money was issued whose raw material was not from silver gold and to maintain its value by helping to impose interest rates which were thus prohibited in Islam. One of the few arguments for banning this interest system is the fact that high interest rates can affect the level of demand for money, while the demand for money is not used for urgent activities such as consumption or productive activities but is more used for speculative activities.

Keywords: *central bank; money circulation; Islamic monetary policy*

Abstrak

Efektifitas penyelenggaraan kegiatan perekonomian di setiap negara senantiasa membutuhkan peran alat pembayaran yang stabil nilai tukarnya agar tidak terjadinya inefisiensi karena fluktuatifnya harga produk dan lembaga keuangan yang memiliki kewenangan mengatur dan menentukan kebijakan moneter yang di sebut dengan Bank Sentral. Tujuan dari dari kebijakan bank sentral selaku pemegang otoritas moneter di antaranya menerbitkan uang, mengendalikan peredaran uang untuk menyesuaikan fakta perekonomian pada sektor riil agar dapat terjadi keseimbangan. Kebijakan moneter di setiap pemerintahan berbeda beda dengan melihat kondisi dan realita perkembangan perekonomian masing masing. Menyikapi hal tersebut salah satu kebijakan moneter yang di ambil pada pemerintahan zaman Nabi adalah dengan menggunakan standar emas dan perak karena tingkat stabilitas nilai tukarnya. Namun hal ini tidak serta merta berlaku pada kebijakan moneter di negara mayoritas muslim pada era modern termasuk di Indonesia karena faktor langkanya bahan baku uang emas maupun perak. Sebagai penggantinya di terbitkan uang fiducier yang bahan bakunya bukan dari emas perak dan untuk menjaga kestabilan nilainya dengan di bantu pemberlakuan suku bunga yang justru dilarang di dalam Islam. Salah satu dari beberapa argumen pelarangan sistem bunga ini adalah fakta bahwa suku bunga tinggi dapat mempengaruhi tingkat permintaan uang, sedangkan permintaan uang ini tidak di gunakan untuk kegiatan yang mendesak seperti konsumsi atau kegiatan produktif tetapi lebih di gunakan untuk kegiatan spekulatif.

Kata Kunci: *bank sentral; peredaran uang; kebijakan moneter Islam*

Pendahuluan

Pada awalnya, orang memenuhi kebutuhan mereka sendiri, membeli makanan dan berburu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada kerjasama di antara orang-orang ketika orang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan mereka. Sebelum orang mengetahui uangnya, mereka menukarnya dengan cara barter. Terakhir, yang dapat dijadikan sebagai alat tukar adalah lebih efisien dan efektif dalam mengatasi segala hambatan yang diciptakan oleh sistem barter. Seperti sekarang ini, akhirnya kita mengenal alat tukar dengan nama "uang". Uang diciptakan sebagai alat tukar dan sebagai solusi atas kelemahan sistem barter. Sebelumnya, mekanisme penukaran dilakukan dengan menukarkan satu barang secara langsung dengan barang lainnya, tergantung kebutuhan pemilik barang tersebut.

Namun mekanisme ini memiliki banyak kelemahan, antara lain: Kesulitan mencari pihak sebagai berikut: Pertama, dia membutuhkan barang

yang bisa dia tawarkan, kedua, dia memiliki barang yang dia butuhkan, ketiga, yang nilainya mendekati atau setara, ada beberapa produk dan keempat siap menggantikannya. Misalnya, orang yang punya nasi dan butuh ayam belum tentu bertemu dengan orang lain yang kebetulan punya nasi dan punya ayam. Karena kesulitan tersebut, uang dijadikan sebagai solusi transaksi. Pada makalah ini akan dibahas tentang standar mata uang internasional serta kelebihan dan kekurangan dari *gold standard*, *standar perca*, *twin standart*, *trust standards*, dan *currency standards*.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kebijakan moneter pada moneter konvensional yang menggunakan lembaga perbankan dan kebijakan moneter Islam yang tidak selalu menggunakan lembaga perbankan sebagai otoritas yang menentukan kebijakan moneternya dan implementasi yang di gunakan di era sekarang. Penulis menggunakan pendekatan kajian kepustakaan sehingga kajian di fokuskan pada bahan kepustakaan dengan menelusuri literatur terkait.

Data data dalam penelitian ini merupakan data teoretik yang diambil dari literatur pustaka di olah dengan menyadur, mengutip dan menggunakan penerapan dan berbagai sumber rujukan dalam artikel ini. Pendekatan kepustakaan ini penulis gunakan untuk memahami dan mengidentifikasi keterkaitan kebijakan moneter dengan menggunakan lembaga perbankan sebagai pemegang otoritas kebijakan moneter. Penulis berusaha menemukan teks, mengklasifikasi, dan menganalisis data tekstual yang bersumber dari data primer maupun sekunder berupa bahan pustaka yang terkait, relevan fokus artikel serta bahan pendukung lainnya.

Pembahasan

Fungsi urgen uang dalam kebijakan moneter

Dalam sejarahnya uang di guakan untuk mempermudah transaksi tukar menukar dan meminimalkan potensi selisih nilai barang yang di barterkan. Penggunaan alat tukar selain simpel dan praktis sekaligus sebagai alat ukur nilai barang yang paling akurat. Penggunaan uang ini merupakan langkah maju dari peradaban manusia yang ingin memangkas praktik riba yang telah berurat dan mendarah daging sejak dahulu kala serta mengefektif dan

efisienkan transaksi dengan cara yang simpel dan mudah. Dalam sistem keuangan modern uang di keluarkan oleh Bank Sentral sebagai otoritas tunggal yang berwenang menerbitkan alat pembayaran yang sah.

Menurut Pasal 13 dan 26 (1) Undang-Undang Bank Sentral Tahun 1968, Bank Indonesia adalah pihak yang berhak mengeluarkan uang kertas dan uang logam di Indonesia.¹Otoritas tunggal ini berfungsi untuk menghilangkan *double issuer* serta potensi penerbitan uang palsu yang mengganggu roda transaksi.²Terdapat beberapa jenis nilai uang dengan mempertimbangkan berbagai unsur dan aspek yang berpengaruh kepada permintaan uang itu sendiri di antaranya adalah sebagai berikutlain :³

1) Nilai intrinsik uang

Merupakan nilai yang terdapat didalamnya sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Semua yang ada pada uang tersebut, mulai dari nominal sampai bahan baku pembuatan uang yang berlaku. Jenis uang ini dapat berupa logam maupun kertas, contohnya uang sepuluh ribu maka nilai nominalnya Rp 10.000 .

2) Nilai ekstrinsik uang

Merupakan kebalikan dari nilai instrinsik, nilai ekstrinsik bisa dilihat dari hubungan sesuatu dengan hal ataupun benda lain. Misalkan mata uang senilai Rp10.00, Dapat di gunakan untuk membeli 2 mangkok bakso, maka hal tersebut adalah nilai ekstrinsik dari mata uang Rp. 10.000. Adapun manfaat dari nilai uang adalah menunjukkan harga, sebagai alat tukar pembayaran, memfasilitasi transaksi jual beli, serta sebagai bentuk kekayaan riil.

Arti nilai uang yang sebenarnya adalah kemampuan untuk menukar daya atau daya beli uang dengan barang dan jasa. Misalnya, 10 tahun yang lalu Anda bisa membeli sepatu seharga 5.000 rupiah, tetapi sekarang tidak mungkin. Artinya, nilai sebenarnya 5.000 turun, tetapi nilai nominalnya tetap sama. Nilai riil mata uang ini ,mengikuti terhadap nilai permintaan terhadap barang dan jasa yang cenderung berubah pada tiap pergerakan ekonomi baik

¹Fathur Rohim, *Mekanisme transmisi Kebijakan Moneter Melalui Suku Bunga SBI sebagai sasaran Operasional Kebijakan moneter dan Variabel Makro Ekonomi Indonesia*(Medan: USU Press,2011),h,81-84

²A Sutawijaya, *Pengaruh faktor faktor Ekonomi terhadap Inflasi Di Indonesia*, Jurnal Organisasi dan Manajemen,80-89.

³Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: LPFE UI Depok,2008),h.110

yang di pengaruhi oleh fluktuasi inflasi maupun faktor kelangkaan alat alat produksi dan faktor lainnya.

Di era modern semua kegiatan transaksi keuangan, perdagangan dan transaksi lainnya mayoritas menggunakan mata uang sebagai alat bayar dan tukar karena mempertimbangkan efisiensi maupun nilai uang itu sendiri yang di jamin oleh pemerintah terkait dan di akui juga oleh pemerintahan lainnya. Bank sentral di berikan otoritas atau kewenangan untuk mengendalikan besaran moneter baik berupa penerbitan, pengendalian uang beredar, uang primer maupun suku bunga untuk pencapaian tujuan ekonomi makro.

Kebijakan moneter Bank Sentral

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh otoritas keuangan (dalam hal ini bank sentral) untuk mengelola variabel keuangan seperti jumlah uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga, dan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis dan input berbasis aspek inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan internasional, dll.⁴ dan faktor faktor lain.

Di Indonesia, tujuan kebijakan moneter yang direvisi beberapa kali oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU Perbankan Indonesia), dan Pasal 7 tercapai. , Menstabilkan nilai Rupiah. Stabilitas rupiah meliputi dua aspek yaitu stabilitas rupiah untuk barang dan jasa yang tercermin dari tingkat inflasi dan stabilitas rupiah untuk mata uang negara lain yang tercermin dari perkembangan nilai tukar. perbandingan.⁵

Pengendalian jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi laju inflasi yang bertujuan mengontrol stabilitas ekonomi, harga, jumlah neraca pembayaran maupun pembukaan lapangan pekerjaan baru. Secara makro kebijakan moneter ini akan dominan di rasakan dampaknya oleh perbankan hingga sektor riil.

⁴Saiful Maqrobi dan Amin P, *Inflasi dan pertumbuhan ekonomi: Uji Kausalitas Inflaton and Economic Growth: Testing for Causality*, Jurnal Dinamika dan Keuangan Perbankan, vol 3 no 1 Mei 2011

⁵Frederick Mishkin, *Ekonomi Uang Perbankan and Financial Market* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.89

Tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi, efeknya akansangat besar dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian.⁶ Stabilitas ekonomi merupakan suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan.⁷ Kebijakan moneter dapat di ambil ketika terjadi ketidakstabilan tingkat harga. Ketidak stabilan ini terjadi ketika jumlah uang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang.⁸ Tingkat kenaikan harga fluktuatif tidak beraturan sehingga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam kasus lain, keseimbangan antara jumlah uang dan jumlah barang dan jasa mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor riil. Investasi ini menyerap lapangan kerja baru dan kehadiran lapangan kerja tersebut berarti menciptakan lapangan kerja.

Instrumen Kebijakan Moneter Bank Sentral

Secara umum, instrumen yang biasa digunakan oleh bank sentral dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah sebagai berikut :

a. Operasi Pasar Terbuka

Tujuan operasi pasar terbuka adalah untuk mengendalikan aliran dana guna mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi dan resesi (*full employment*).⁹Tujuan lain dari operasi pasar terbuka yaitu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja dan perbaikan neraca pembayaran.¹⁰ Kebijakan operasi pasar terbuka ini akan memengaruhi jumlah uang beredar, baik untuk memperbesar atau ekspansi dan memperkecil atau kontraksi jumlah uang beredar. Serta berpengaruh pada jumlah kuantitas beredarnya uang, hal ini nanti berkaitan

⁶Barro RJ, *Harapan Rasional dan Peran Kebijakan moneter*, Jurnal Ekonomi Moneter ,2(5),2016,h.1-33

⁷Ferry Irawan dan Sugiharso Saufan,*Kebijakan moneter pertumbuhan ekonomi dan pengujian Hipotesis Ekspektasi Rasional dengan analisis VAR*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol.6 no 1 tahun 2005,h.28-31

⁸Perry Warjiyo dan Juda Agung, *Mekanisme Transimi Kebijakan moneter d Indonesia. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BankIndonesia*, Buletin Ekonomi dan Moneter dan Perbankan, Juni 2008,h.97-98

⁹Faisal Affandi,*Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar BI Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional terhadap Margin Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2010-2015*, Jurnal Attawasuth, vol 1 no 1 tahun 2016,h.45-72

¹⁰Nurul Jannah,*Pengaruh Operasi Moneter terhadap Inflasi Indonesia*,Attawasuth Jurnal Ekonomi Islam, vol 5 no 1 tahun 2020.

dengan tingkat kestabilan harga. Disisi lain dalam suatu pengambilan kebijakan moneter itu ada target tersendiri ada yg untuk mencapai target operasionalnya sehingga kelancaran kegiatan perekonomian baik skala mikro ataupun makro skala waktu dari jangka pendek, menengah, ataupun panjang nya memiliki prospek yang tinggi.

Selanjutnya dapat berdampak pada pencapaian dan instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter. Target operasional kebijakan moneter yang berupa target kuantitas uang primer serta komponennya atau target suku bunga pasar jangka pendek dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter bank indonesia dengan melakukan kegiatan seperti penerbitan SBI, jual beli valas terhadap rupiah, jual beli surat berharga.¹¹ Sehingga jika nanti dikaitkan dengan pemulihan ekonomi sangat berkaitan sekali yaitu menambah devisa negara karena banyak orang yg lebih melek lagi investasi dengan produk surat berharga yg dikeluarkan pemerintah.

b. Giro Wajib Minimum (GWM)

Cadangan hukum (MLB) diatur oleh bank sentral, dan bank diharuskan memiliki sejumlah dana (cadangan) saat ini yang sama dengan persentase tertentu dari kewajiban lancar mereka. Semakin kecil persentasenya, semakin baik kemampuan bank dalam menggunakan likuiditas (cadangan) untuk memberikan kredit lebih banyak.

c. Fasilitas Diskonto

Jika bank sentral ingin meningkatkan pendanaannya di masyarakat, itu akan mengurangi tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman kepada bank umum, dan mengurangi biaya dan bunga yang dibayarkan oleh bank umum.

d. Himbauan Moral

Bank sentral dapat membuat himbauan moral kepada bank yang pada dasarnya direktif melalui gubernur bank sentral atau memberikan lebih banyak informasi makro melalui sebuah pernyataan. Tujuannya adalah untuk membuat informasi tersedia bagi bank umum sebagai masukan untuk mengelola aset dan kewajiban.

¹¹Haryono dkk, *Mekanisme pengendalian Moneter dengan inflasi sebagai Sasaran Tunggal*, Buletin

Secara umum, jika Bank Sentral akan meningkatkan output dalam kebijakan ekonomi moneter, ada 3 langkah yang akan dilakukan, yaitu pertama Bank membeli saham dari pemerintah untuk meningkatkan suplai uang; kedua Peningkatan suplai uang akan menyebabkan tingkat suku bunga menurun; Ketiga Konsumen dan bisnis akan merespon dengan mengambil pinjaman lebih banyak dan menggunakan uangnya untuk membeli lebih banyak barang dan jasa.

Penetapan suku bunga sebagai bentuk kebijakan moneter

Suku bunga bank didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan bank kepada pelanggan untuk membeli atau menjual produk. Atau dengan kata lain bahwa pada uang tersebut terdapat sewa yang harus di bayarkan oleh debiturnya karena uang di anggap memiliki *value time of money* di mana pendapat ini bertolak belakang dengan pengertian fungsi uang yang berkembang dalam pemikiran sarjana dan ahli hukum dan ekonomi Islam. Penetapan plafon suku bunga ini menjadi otoritas bank Sentral yang dalam hal ini di pegang oleh Bank Indonesia.

Bunga pinjaman adalah imbalan tetap kepada peminjam atas pinjaman yang diterima bank. Penggunaan suku bunga ini adalah salah satu wujud kebijakan makro pemerintah yang di gunakan sebagai pengendali perekonomian sekaligus alat untuk mendapatkan profit pada sektor keuangan. Di dalam industri perbankan, terdapat 5 (lima) jenis suku bunga, yaitu:

a. Suku bunga tetap (*fixed*)

Suku bunga tetap adalah suku bunga tetap yang tidak berubah sampai dengan jangka waktu atau tanggal jatuh tempo (selama umur pinjaman). Salah satu contohnya adalah bunga rumah murah atau bersubsidi dengan tingkat bunga tetap. Anda juga dapat menggunakan suku bunga tetap untuk pinjaman mobil Anda.

b. Suku bunga mengambang (*floating*)

Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik, begitupun sebaliknya. Contohnya adalah suku bunga KPR untuk periode tertentu. Misalnya untuk dua tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap, namun periode selanjutnya menggunakan suku bunga mengambang.

c. Suku bunga *flat*

Suku bunga *flat* adalah suku bunga yang penghitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Penghitungannya sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, Misalkan, Bank memberikan kredit dengan jangka waktu 10 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 dengan bunga 10% per tahun (*flat*). Asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah (tetap) selama jangka waktu kredit.

d. Suku bunga efektif

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan.

e. Suku bunga anuitas

Dengan metode ini, jumlah pokok dan beban bunga ditetapkan sama setiap bulannya. Saat menghitung anuitas, porsi bunganya sangat besar dan porsi pelunasan awalnya sangat kecil. Segalanya menjadi lebih baik sebelum akhir periode pinjaman. Bagian utama sangat besar dan bagian bunga kecil. Skema suku bunga tahunan ini biasanya berlaku untuk pinjaman jangka panjang seperti KPR dan pinjaman investasi. Rumus untuk menghitung bunga sama dengan cara efektif. Artinya, terlihat seperti ini: Misalnya, bank memberikan pinjaman 10 bulan sebesar Rp15.000.000,00 dengan tingkat bunga tahunan 10% (pensiun). Dengan asumsi bahwa tingkat bunga pinjaman tidak berubah selama masa pinjaman (tetap). Bank biasanya menerapkan kombinasi suku bunga saat meminjamkan.

Kebijakan moneter Islam

Kebijakan moneter Islam selalu didasarkan pada situasi aktual. Singkatnya, kebijakan moneter tidak terlepas dari perubahan kondisi sektor riil. Sektor fisik menentukan tingkat ekuilibrium sektor moneter, namun bukan berarti pergerakan sektor fisik dipicu oleh sektor moneter. Kebijakan moneter Islam didasarkan pada alokasi sumber daya untuk mencapai produktivitas maksimum.

Dalam kebijakan moneter Islam permintaan uang di arahkan untuk memenuhi transaksi dan investasi yang produktif. Permintaan uang yang bermotif spekulasi tidak dapat berdampak pada peningkatan sektor riil. Motif

spekulasi ini hanya akan mengakibatkan adanya mis alokasi dana dan inefisiensi permintaan uang¹² kepada kegiatan bisnis yang tidak membawa nilai tambah dalam sektor riil.

Permintaan uang untuk motif spekulasi didorong oleh faktor banyaknya praktik pinjam meminjam uang dengan sistem kredit. Di dalam Islam penetapan bunga ini tidak di anggap sebagai sebuah kebijakan artinya bersifat ilegal karena tidak terkait dengan sektor riil dan sama sekali tidak berpengaruh terhadap volume kapasitas transaksi yang riil.¹³ Islam memandang bahwa efektivitas permintaan uang ini akan terwujud jika pemerintah selalu menjaga nilai tukar uang, serta mencegah dan melarang perdagangan uang serta melarang peredaran uang palsu.¹⁴

Penggunaan uang *fiducier* tentu memiliki berbagai resiko karena faktor instabilitas nilai tukarnya , permintaan serta penggunaannya semestinya dapat berjalan dengan stabil meskipun dengan tanpa ada bunga, meskipun realitasnya pemberlakuan bunga pada uang fiducier ini di era modern merupakan sesuatu hal yang tidak dapat di hilangkan.¹⁵ Para ahli hukum Islam mayoritas berpendapat bahwa otoritas yang berwenang dalam hal ini adalah Bank Sentral yang dapat mengeluarkan uang namun berkewajiban untuk menjamin stabilitas nilai tukar uang fiducier tersebut. Menurut Al Ghazali sebagaimana di kutip oleh Chapra¹⁶ pemerintah wajib menyatakan bahwa uang fiducier yang yang di cetak tersebut adalah alat pembayaran resmi. Pemerintah wajib menjaga stabiitas nilai tukaernya dengan mengatur jumlah uang yang beredar harus sesuai kebutuhan dan memastikan tidak ada perdagangan uang. Uang *fiducier* ini di tuntutan harus dapat memenuhi fungsi sebagai alat tukar, alat ukur dan alat penyimpan daya beli.

Imbas dari ketidak stabilan nilai tukar mata uang bukan emas dan perak yang kita sebut dengan uang fiducier ini dapat mengakibatkan perekonomian

¹² Ahmad Hassan, Mata Uang Islam: *Telaah komprehensif sistem Keuangan Islam*, (Jakarta Radja, 2004), h 8.

¹³ Sholikul Hdi dan M Romli, *Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini*, Religi Social Education Laa Royba Jurnal, vol 3 no 1, tahun 2021, h.49-53

¹⁴ Adiwarmarman, *Ekonomi Makro Islami*, 210.

¹⁵ Rindani Dwi Hapsari dkk, *Analisis Kebijakan Moneter dalam Perspektif Konvensional dan Syariah terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2013-2020* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, STIE AAS.

¹⁶ Umer Chapra, *Al Qur'an: Menuju sistem Moneter yang Adil*, Terj. Toward a Just Monetary System, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima, 1997), h.85

tidak berjalan pada titik keseimbangan. Menurut Ibnu Khaldun pembangunan pada suatu negara akan berjalan secara berkelanjutan dengan adanya jaminan keadilan sistem.¹⁷ Berhasil atau tidaknya tujuan dari kebijakan moneter ini paling tidak di pengaruhi oleh kekuatan hubungan kebijakan moneter dengan kegiatan ekonomi serta jangka waktu erubahan kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi.¹⁸

Permintaan akan uang menurut Adiwarmen¹⁹ didasarkan oleh faktor faktor keperluan dan keadaan mendesak seperti konsumsi dan usaha produktif, bukan di karenakan faktor faktor dorongan konsumsi yang berlebihan (*conspicuous consumption*), spekulasi dan investasi yang tidak produktif. Regulasi pemerintah yang mengendalikan permintaan uang dengan suku bunga terbukti justru mengakibatkan penyalahgunaan sumber dana untuk tujuan yang tidak produktif.²⁰ Islam menerapkan variabel variabel untuk mengendalikan permintaan uang dengan menjunjung tinggi nilai nilai moral, mengaktifkan lembaga sosial ekonomi dan politik termasuk mekanisme harga, serta menggunakan patokan keuntungan riil²¹ sebagai pengganti keberadaan suku bunga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan.

Kebijakan moneter Islam secara teknis harus bebas dari unsur riba serta bunga bank. Penggunaan bunga Bank sebagai instrumen utama manajemen moneter tidak berlaku dalam Islam. Sebagai gantinya kebijakan moneter Islam di dasarkan pada prinsip bagi hasil. Kegiatan perekonomian zaman Nabi bertumpu pada perdagangan dengan alat transaksi uang dinar dan dirham yang telah familiar bagi masyarakat waktu itu. Dinar dirham sebagai mata uang berear dengan baik, tidak ada larangan impor dinar dirham, transaksi tidak tunai di perbolehkan, cek dan promissory note di gunakan anjak piutang atau di kenal dengan hiwalah lazim di praktikkan.

Nilai emas atau perak yang terkandung dalam koin dinar dirham sama dengan nilai nominalnya bahkan uang tersebut dapat di gunakan sebagai perhiasan. Artinya kondisi permintaan dan penawaran uang stabil.²²

¹⁷Ibnu Khaldun, al Muqaddimah (Beirut: Dar al Fikr, 1988),

¹⁸Latifah NA, *Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Modernisasi 11(2), 124-134.

¹⁹Adiwarmen A Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Radja Grafindo, 2014), cet 7, h. 179

²⁰A Sutawijaya, *Pengaruh faktor faktor Ekonomi terhadap Inflasi Di Indonesia*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, 85-101.

²¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), H. 168

²²Amin Wahyudi, *Jurnal Justitia Islamica*, vol 10 no 1/Jan Juni 2013, h.6

Permintaan uang lebih karena untuk keperluan transaksi, dan jaga jaga, tidak ada spekulasi serta penimbunan uang. Larangan *talaqqi rukban* yang berpotensi menghambat informasi harga riil di pasar di larang karena berpotensi menimbulkan spekulasi.²³

Instrumen kebijakan moneter Islam

Secara garis besar, kebijakan moneter Islam memberlakukan kontrol kuantitatif atas pinjaman dan penerapan batas kredit. Artinya, batas kredit maksimum yang dapat ditawarkan bank komersial kepada pelanggannya untuk tujuan keuangan. Pemerintah kemudian dapat menggunakan 4.444 giro untuk mempengaruhi cadangan bank komersial. Hampir sebanding dengan fungsi operasi pasar terbuka bahwa bank sentral memiliki dampak langsung pada bank komersial. Selain itu, membentuk kumpulan bersama adalah alat yang mengharuskan bank komersial untuk mengamankan beberapa simpanan yang dikelola berdasarkan kesepakatan untuk mengatasi masalah likuiditas. Kemudian melakukan kontak langsung, konsultasi dan pertemuan dengan bank umum untuk memantau kekuatan dan masalah bank umum. Hal ini memungkinkan bank sentral untuk secara tepat menasihati mereka untuk mengatasi masalah perbankan yang dihadapi untuk memfasilitasi pencapaian tujuan perbankan yang direncanakan.

Pemerintah juga dapat menjamin alokasi sektor kredit kepada sektor produktif berupa alokasi kredit perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan optimum bagi pelaku usaha berupa barang maupun jasa yang dapat terdistribusi kepada masyarakat luas. Pada realnya bahwa penghimpunan dana perbankan dominan di peroleh dari masyarakat kecil namun penyaluran kredit kepada mereka justru berbanding terbalik. Berbagai syarat pengajuan kredit dengan jaminan tertentu yang cenderung memberatkan pelaku usaha kecil dapat mengancam kelangsungan usaha merek ameskipun sebenarnya usaha kecil dapat memperluas kesempatan kerja, menghasilkan produk serta memperbaiki distribusi pendapatan.

Skim penjaminan bagi bank untuk berpartisipasi pada pembiayaan atau kredit untuk usaha produktif dengan bertumpu pada penegakan moral. Jika terjadi kegagalan karena moral maka dana bank dapat memperoleh kembali

²³Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, (JAKARTA: Gema Insani, 2001), h.28

dananya, namun jika di akibatkan kondisi ekonomi yang memburuk maka bank harus ikut menanggung resiko.

Penutup

Kesimpulan

Kebijakan moneter diterapkan sejalan dengan siklus bisnis yang tumbuh cepat dan tumbuh lambat. Ada dua jenis kebijakan moneter. Artinya, kebijakan moneter diperpanjang adalah kebijakan moneter yang digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi, misalnya dengan meningkatkan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang dirancang untuk menunda kegiatan ekonomi, misalnya dengan mengurangi jumlah uang beredar. Tujuan Kebijakan moneter bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dan produksi sehingga dapat dicapai pertumbuhan ekonomi. Implementasi kebijakan moneter menjadi penting karena berkaitan dengan anggapan bahwa uang yang beredar berkaitan erat dengan sektor barang dan jasa atau sektor bisnis. Dengan mengelola jumlah uang yang beredar di masyarakat, Anda dapat mempengaruhi variabel ekonomi dunia nyata seperti tingkat harga, investasi, dan produksi. Penggunaan mata uang emas dan perak menjadi pilihan dalam kebijakan moneter Islam karena sifatnya yang stabil. Ini telah terbukti menjadi nilai dan reseptif, kurang tahan dan lebih menguntungkan daripada menggunakan tolok ukur yang sangat bergantung pada produk suku bunga, dan bank sentral perlu mengadopsi kebijakan pasar terbuka.

Daftar Pustaka

- Barro RJ, *Harapan Rasional dan Peran Kebijakan moneter*, Jurnal Ekonomi Moneter ,2(5),2016.
- Chapra, Umer. 2016.*Sistem Moneter Islam*,Jakarta: Gema. Terj. Hasan A 2009. *Al Qur'an: Menuju sistem Moneter yang Adil*, Terj.Toward a Just Monetary System,Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima.
- Ferry Irawan dan Sugiharso Saufan, *Kebijakan moneter pertumbuhan ekonomi dan pengujian Hipotesis Ekspektasi Rasional dengan analisis VAR*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia,Vol.6 no 1 tahun 2005.

- Hadi, Sholikhul dan M Romli, *Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini*, Religi Social Education Laa Royba Jurnal, vol 3 no 1, tahun 2021.
- Hapsari, Rindani Dwi dkk, *Analisis Kebijakan Moneter dalam Perspektif Konvensional dan Syariah terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2013-2020* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, STIE AAS.
- Haryono dkk, *Mekanisme pengendalian Moneter dengan inflasi sebagai Sasaran Tunggal*, Buletin
- Haryono dkk, *Mekanisme pengendalian Moneter dengan inflasi sebagai Sasaran Tunggal*, Buletin
- Hassan, Ahmad. 2004. *Mata Uang Islam: Telaah komprehensif sistem Keuangan Islam*, Jakarta Radja.
- Karim, Adiwarmanto A. 2017. *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Radja Grafindo, cet 7.
- Karim. Adiwarmanto Azwar .2001. *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.
- Khaldun, Ibnu. 1988. terj. Umar Hamdan. *al Muqaddimah* Beirut: Dar al Fikr.
- Latifah NA, *Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Modernisasi 11(2), 124-134.
- M Sufi, *Penerapan Dinar Stabilitas ekonomi dan Moneter Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol 6 no 2, tahun 2020.
- Maqrobi, Saiful dan Amin P, *Inflasi dan pertumbuhan ekonomi: Uji Kausalitas Inflation and Economic Growth: Testing for Causality*, Jurnal Dinamika dan Keuangan Perbankan, vol 3 no 1 Mei 2011
- Mishkin, Frederich. 2009. *Ekonomi Uang Perbankan and Financial Market* Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 2005. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Norman, Efrita dkk, *Prinsip Kompensasi dalam Perspektif Islam*, Reslaj, Jurnal Pendidikan Agama Sosial Laa Royba, vol 3 No 1 tahun 2021.
- ¹Perry Warjiyo dan Juda Agung, *Mekanisme Transisi Kebijakan moneter di Indonesia*. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Buletin Ekonomi dan Moneter dan Perbankan, Juni 2008.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, 2008. *Teori Ekonomi Makro* Jakarta: LPFE UI Depok.

- Rohim, Fathur. 2011. *Mekanisme transmisi Kebijakan Moneter Melalui Suku Bunga SBI sebagai sasaran Operasional Kebijakan moneter dan Variabel Makro Ekonomi Indonesia*. Medan: USU Press.
- Sufi, Muhammad. *Penerapan Dinar Stabilitas ekonomi dan Moneter Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol 6 no 2, tahun 2020.
- Sutawijaya, A. *Pengaruh faktor faktor Ekonomi terhadap Inflasi Di Indonesia*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, 85-101.
- Wahyudi, Amin. *Jurnal Justitia Islamica*, vol 10 no 1/Jan Juni 2013.

Copyright © 2022 *Journal Salimiya*: Vol. 3, No.1, Maret 2022, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of *Jurnal Salimiya* is the property of *Jurnal Salimiya* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>

Salimiya, Vol. 3, No.1, Maret 2022